

IMPLEMENTASI BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH DI KOTA PADANG

Oleh : Muhammad Febri

M.febri1602@gmail.com

Pembimbing : Prof. Dr. H. Sujianto, M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi - Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax 0761-63272

Abstract

The background of the research based on communication problems between the implementation and the recipient of the House help is not feasible. Human resource limitation in assisting the recipient of home assistance is not habitable. Limited budgets for home repairs are not habitable. The research aims to determine the implementation of unhabitable home aid and see the inhibiting factors of implementation of home aid program is not habitable in Padang city. The concept of theory used is the implementation theory by Edward III (Widodo, 2011) namely: communication, resources, disposition, bureaucratic structure. The study uses qualitative methods with a phenomenological approach, with data collection techniques including: interviews, documentation and observations. The results of this study showed that the implementation of unfeasible home aid for low-income communities in Padang is not maximized. Factors that inhibit the communication performed by the implementation is not optimal, limited human resources so that it is not optimal to assist beneficiaries, a limited budget for housing improvements is not livable.

* **Keywords** : Policy, Implementation of Policy, Programs, Poor People

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan Perumahan dan Permukiman di Indonesia terjadi karena kurang siapan kota dengan sistem perencanaan dan pengelolaan kota yang tepat, dalam mengantisipasi penambahan penduduk dengan berbagai motif dan keragaman, nampaknya menjadi penyebab utama yang memicu timbulnya permasalahan

perumahan dan permukiman. Mewujudkan permukiman dan perumahan yang layak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 Pasal 54 Ayat (2) dan Ayat (3) menyatakan bahwa pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan. Kemudahan dan/atau bantuan

pembangunan dan perolehan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) salah satunya berupa stimulan rumah swadaya.

Berdasarkan PERWAKO Padang No. 25.A Tahun 2016 pada Bagian Ketiga Pasal 6 persyaratan bantuan Rumah Tidak Layak Huni meliputi:

- (1) MBR yang memohon bantuan Rumah Tidak Layak Huni harus memenuhi persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Surat permohonan;
 - b. Surat pernyataan dan kuasa diatas materai secukupnya yang menyatakan:
 1. Belum pernah menerima bantuan rumah berupa dana maupun barang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi atau APBD;
 2. Tanah merupakan tanah milik sendiri dan bukan tanah warisan yang belum dibagi;
 3. Satu-satunya rumah yang dimiliki untuk ditingkatkan kualitasnya atau belum memiliki rumah;
 4. Akan menghuni sendiri rumah yang mendapat bantuan Rumah Tidak Layak Huni;
 5. Tidak memberikan barang bantuan Rumah Tidak Layak Huni kepada pihak lain dengan dalih apapun;

6. Bersungguh-sungguh mengikuti program bantuan Rumah Tidak Layak Huni dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan bantuan Rumah Tidak Layak Huni; dan

- c. Fotocopi sertifikat hak atas tanah, fotocopi surat bukti menguasai tanah atau surat keterangan menguasai tanah dari lurah;
- d. Fotocopi KTP nasional atau KTP seumur hidup;
- e. Fotocopi Kartu Keluarga; dan
- f. Surat keterangan penghasilan dari tempat kerja bagi yang berpenghasilan tetap atau dari lurah bagi yang berpenghasilan tidak tetap.

Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni merupakan bantuan agar rakyat miskin menempati rumah layak huni. Tujuan dari Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni ini untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah yang layak huni. Selain itu Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni juga bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik dan memberikan kehidupan yang layak, hidup bersih dan sehat sehingga manfaat bantuan tersebut dapat dirasakan dalam jangka yang panjang. Masyarakat Berpenghasilan Rendah adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.

Sumber dana program Rumah Tidak Layak Huni berdasarkan dari

APBD kota Padang, APBD provinsi sesuai dengan kegiatan Rumah Tidak Layak Huni. Dana yang diberikan berjumlah Rp 15.000.000,00 dengan rincian Rp 12.500.000,00 berupa bahan material dan Rp 2.500.000,00 sebagai upah yang dibukakan rekening untuk penerima bantuan. Dari rekening penerima bantuan itu ditransfer ke toko bangunan untuk membayar material yang dibutuhkan. Kriteria rumah tidak layak huni yang diperbaiki adalah :

1. Bahan lantai berupa tanah atau kayu kelas IV,
2. Bahan dinding berupa bilik bambu/rotan/papan atau kayu kelas IV, tidak/kurang mempunyai ventilasi dan pencahayaan,
3. Bahan atap berupa seng yang sudah rapuh/berkarat,
4. Rusak berat atau rusak sedang dan luas lantai bangunan tidak mencukupi standar minimal luas per anggota keluarga yaitu 9 m² (sembilan meter persegi).

Bantuan yang diberikan ditujukan sebagai suntikan untuk masyarakat berpenghasilan rendah agar mampu berdaya guna untuk meningkatkan kualitas rumahnya, tapi pada kenyataannya sebagian besar masyarakat yang memperoleh bantuan tidak mampu melaksanakan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan yakni mengutamakan kemandirian dari masyarakat tersebut. Karena masih ada masyarakat yang tidak bisa maksimal untuk swadaya karena bantuan dari pemerintah kota Padang tidak bisa memperbaiki keseluruhan maka dari itu di harapkan swadaya masyarakat untuk memperbaiki yang tidak bisa dilakukan pemerintah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Padang ?
2. Apa faktor penghambat dalam Implementasi Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Padang ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Implementasi Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Padang
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat Implementasi Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Padang

1.4 Manfaat penelitian

1. Manfaat akademis, Dengan ketepatan sasaran dari Implementasi Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Padang, penelitian ini diharapkan menjadi sumber wawasan dan pengetahuan khususnya untuk perkembangan Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik.
2. Manfaat praktis, Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan rekomendasi bagi pihak

berwenang baik itu pembuat kebijakan (pemerintah) maupun pelaksana Program Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.

2. KONSEP TEORI

2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut **Thomas Dye** sebagaimana yang dikutip oleh **Subarsono (2005:2)** berpendapat bahwa kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah disamping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik.

Kebijakan publik tidak serta merta dapat diimplementasikan langsung. Tentu harus ada rumusan-rumusan gagasan yang kemudian diformulasikan ke dalam suatu tindakan (program). Karena di dalam perumusan tersebut, setiap orang atau kelompok orang yang ada di dalam pemerintahan memiliki pandangan dan pemahaman yang berbeda mengenai kebijakan publik. Begitu pula ketika kebijakan publik dilaksanakan, juga tergantung kepada orang atau sekelompok orang yang memahami kebijakan tersebut.

Kebijakan publik menurut **Lasswell** dalam (**Nugroho, 2017:3**) mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan

proyek-proyek tertentu. Menurut pandangannya, kebijakan merupakan studi tentang proses pembuatan keputusan atau proses memilih dan mengevaluasi informasi yang tersedia, kemudian memecahkan masalah-masalah tertentu.

2.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, Maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut.

Edward III dalam Widodo (2011:96-110) mengajukan empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor communication, resources, disposition, dan bureaucratic structure.

a. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*) (**Widodo, 2011:97**). Widodo kemudian menambahkan bahwa informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang

menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target group*) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (*transmisi*), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*). Dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

b. Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. **Edward III dalam Widodo (2011:98)** mengemukakan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang

mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia (*Staff*)

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikas, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang kehandalan sumber daya manusia, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

2. Anggaran (*Budgetary*)

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

3. Fasilitas (*facility*)

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan

peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

4. Informasi dan Kewenangan (*Information and Authority*)

Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

c. Disposisi (*Disposition*)

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

d. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat *standart operation procedur* (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Implementasi kebijakan menurut **Charles O. Jones** dalam **Tahir (2015:81)** mengatakan bahwa Implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga aktivitas utama kegiatan. Menurut Jones ketiga aktivitas tersebut dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. Tiga aktivitas dimaksud adalah:

- a. Organisasi, pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menunjang agar program berjalan.
- b. Interpretasi, menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan, dan
- c. Aplikasi (penerapan), berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin

yang meliputi penyediaan barang dan jasa.

2.3. Program

Program adalah unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Sebuah program dapat dikatakan berhasil atau baik apabila ada manfaatnya atau pengaruh yang positif bagi masyarakat. Menurut **Solihin (2009:71)** mengatakan bahwa program merupakan serangkaian kegiatan yang memiliki durasi waktu tertentu serta dibuat untuk mendukung tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut **Nakamura dan Smallwood** dalam **Sujianto (2008:152)** mengemukakan bahwa ada tiga cara yang dominan untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan program:

- a. Perspektif yang menilai keberhasilan pelaksanaan program dari aspek kepatuhan aparat birokrat bawahan kepada birokrat atasannya, atau derajat kepatuhan birokrasi-birokrasi pada umumnya terhadap mandat/kebijakan yang dituangkan dalam undang-undang.
- b. Keberhasilan pelaksanaan program dari segi berfungsunya prosedur-prosedur rutin dalam pelaksanaan program dan tidak adanya konflik kedua perspektif ini mendefinisikan keberhasilan pelaksanaan program dilihat dari segi proses.
- c. Keberhasilan pelaksanaan program dilihat dari segi pencapaian tujuan-tujuan programatis yang diharapkan dari dampak program.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian jenis kualitatif yang bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Padang, Kecamatan Pauh dan Kecamatan Padang Selatan karena keterbatasan peneliti. Dimana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai pelaksana Program Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni. Alasan peneliti memilih Kecamatan Pauh dan Kecamatan Padang Selatan untuk melihat Implementasi Program Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Padang.

3.3 Informan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu peneliti menentukan informan yang dianggap memiliki informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Adapun informan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Seksi Penyediaan Perumahan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Padang;
2. Fasilitator Lapangan

3. Masyarakat penerima Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.

3.4 Jenis Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari informan dilapangan yang menjadi subjek penelitian, berupa informasi yang relevan dengan masalah-masalah yang sudah dirumuskan dalam penelitian. Penelitian lapangan tersebut dilakukan untuk mendapatkan informasi maupun data seakurat dan seobyektif mungkin, sehingga dapat menggambarkan kondisi sesuai fakta yang ada dilapangan. Baik melalui observasi maupun wawancara. Data primer dalam penelitian ini diperoleh penulis melalui wawancara secara langsung dengan informan yaitu *state* (Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Padang), *private sector* (pihak ketiga/penyedia jasa bahan bangunan) dan *civil society* (masyarakat) yang berkaitan dengan implementasi bantuan perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Padang.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang didapatkan, seperti laporan-laporan, literatur-literatur, serta hasil laporan dan penelitian terdahulu (jurnal), dan lampiran data-data lain yang dipublikasikan yang mana dapat mendukung dan menjelaskan masalah. Data yang diperoleh dalam rangka mendukung dan mencari jawaban pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. UU No 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman,

2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011, tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman,
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/Prt/M/2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya,
4. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 07/Se/Dr/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya,
5. Peraturan Walikota Padang Nomor 25.a tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Padang,
6. Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Padang.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan pada periode bulan November 2018 sampai dengan Desember tahun 2019. Penelitian ini dilakukan secara bertahap, terdiri dari :

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan cara turun langsung ke lokasi untuk mengamati segala perilaku dan aktivitas yang ingin diteliti. Peneliti mencatat dan atau merekam proses observasi berupa aktivitas-aktivitas dalam lokasi penelitian baik terstruktur maupun semistruktur yaitu dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada responden sebagai proses pengumpulan data, atau hanya menjadi

non partisipan (pengamat). Teknik ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana Implementasi Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Padang.

b. *Interview* (Wawancara)

Wawancara dilakukan secara bertahap berdasarkan urutan informan yang sudah ditetapkan sekaligus melakukan survei kelokasi penelitian untuk melihat keadaan yang nyata di lapangan. Hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dari narasumber yang berbeda-beda di analisis dan dipahami secara mendalam setelah itu direkap menjadi hasil analisis dan di dukung dengan hasil survey yang ditemukan di lapangan.

c. Dokumentasi

Data yang diambil melalui dokumentasi, yang bertujuan melengkapi data penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini, data dapat berupa file, foto dan lain sebagainya. Selama proses penelitian, peneliti juga mengumpulkan dokumen-dokumen yang berupa dokumen publik (seperti koran, makalah, laporan kantor) ataupun dokumen *private* (seperti buku harian, diary, surat, e-mail). Dokumentasi dalam penelitian ini penulis peroleh dari dokumentasi pribadi yang diberikan oleh intansi terkait dan beberapa dokumentasi pribadi yang ambil dilapangan.

3.6 Analisa Data

Analisis data pada penelitian ini yaitu analisis data dengan pendekatan

linear dan hierarki mengenai analisis data dalam penelitian kualitatif, sebagai berikut:

Pertama, Tahap pertama yang peneliti lakukan adalah mempersiapkan data untuk dianalisis, dengan cara memilah, men-scanning hasil transkrip wawancara dengan informan-informan penelitian. Yang kemudian peneliti lakukan dengan mencatat dan menyusun data ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi. Yang kemudian peneliti lakukan dengan mencatat dan menyusun data ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi. Tahap pertama ini peneliti lakukan setelah keseluruhan wawancara selesai dilakukan.

Kedua, Tahap selanjutnya, peneliti membaca keseluruhan data untuk membangun informasi yang diperoleh tentang Implementasi Program Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Padang, dari hasil transkrip wawancara dengan menentukan gagasan umum apa yang terkandung dalam perkataan informan penelitian, bagaimana nada gagasan-gagasan tersebut, dan bagaimana kesan dari kedalaman, penuturan informasi tersebut.

Ketiga, Setelah itu, peneliti lakukan dengan men-coding data. Yaitu proses mengolah materi atau informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Pada tahap ini peneliti mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan saat penelitian berlangsung. Data tulisan tersebut berupa Peraturan Walikota Padang Nomor 25.a Tahun 2016 Tentang

Pedoman Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Padang.

Keempat, Tahap selanjutnya, peneliti menghubungkan hasil wawancara dengan teori yang digunakan yaitu teori Implementasi Kebijakan untuk dijadikan suatu rangkaian cerita dalam narasi atau laporan kualitatif.

Kelima, Tahap terakhir peneliti memaknai data, dengan membandingkan antara hasil penelitian dengan informasi yang didapatkan oleh peneliti dari setiap informan.

5. HASIL PENELITIAN

5.1 Implementasi Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Padang.

5.1.1 Komunikasi

Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi atau publik dan sikap serta tanggapan pihak yang terlibat. Sedangkan pengertian komunikasi adalah merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Hal ini juga terjadi dalam pelaksanaan program bantuan rumah tidak layak huni di kota padang, dengan komunikasi yang baik dan efektif tujuan dari pelaksanaan program bantuan rumah tidak layak huni tersebut dapat dipahami oleh masyarakat atau kelompok sasaran

yang menerima bantuan secara akurat. Oleh karena itu diperlukan tiga indikator untuk mengukur keberhasilan komunikasi tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Transmisi
2. Kejelasan (*Clarity*)
3. Konsistensi

5.1.2 Sumber Daya

Sumber daya merupakan aspek penting kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi karena ketika melaksanakan sebuah kebijakan tanpa adanya sumber daya sebuah kebijakan akan menjadi sia-sia dan tidak efektif. Oleh karena itu tenaga yang ahli dan relevan dalam ukuran yang tepat, karena pelaksanaan kebijakan tidak akan efektif kalau tidak ditangani oleh orang-orang yang ahli yang relevan dengan tugas-tugasnya. Oleh karena itu diperlukan tiga indikator untuk mengukur keberhasilan sumber daya, yaitu sebagai berikut :

1. Sumber daya manusia (*staff*)
2. Anggaran
3. Fasilitas
4. Informasi dan wewenang

5.1.3 Disposisi

Faktor penting lain yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah disposisi atau sikap implementor. Jika suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Implementor yang baik harus

memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan dan ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Implementasi kebijakan apabila memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasinya menjadi tidak efektif dan efisien. Oleh karena itu pelaksanaan kebijakan tidak boleh terjadi kesenjangan antar pembuat dan pelaksana dan saling mendukung agar dalam pelaksanaannya dapat berhasil dengan baik.

5.1.3 Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh penting pada implementasi. Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama dari pihak-pihak yang lebih banyak. Jika terdapat suatu kelemahan dalam struktur birokrasi, maka hal ini akan mengakibatkan sumber daya yang ada menjadi tidak efektif dan menghambat pelaksanaan suatu kebijakan. Sebagai pelaksana sebuah kebijakan, birokrasi harus dapat mendukung kebijakan yang telah dilaksanakan dengan melakukan koordinasi yang baik antar unit dalam organisasi yang ada. Aspek struktur terdapat dua cakupan yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Mekanisme adalah aspek pertama dalam kebijakan, biasanya sudah dibuat Standar Operasi Prosedur (SOP). Sebagai pedoman bagi implementor dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang

dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan struktur organisasi menjadi tidak fleksibel. Kebijakan yang berbentuk program harus mempunyai prosedur dan standar operasional agar kebijakan tersebut terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

5.2 Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Padang.

5.2.1 Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi keberhasilan program yang dilaksanakan. Pelaksanaan yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan dikerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan dan peraturan pelaksanaan harus dikomunikasikan kepada implementor yang tepat. Dengan kata lain, tujuan, sasaran, dan berbagai informasi yang berkaitan dengan kebijakan harus ditafsirkan dengan baik dan benar untuk menjamin keberhasilan suatu program. Terutama saat mengadakan sosialisasi kepada calon penerima bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

5.2.2 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan suatu hal yang sangat

penting dan harus dimiliki dalam upaya mencapai tujuan suatu program. Dalam program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni ini, terutama di kelurahan yang menjadi sasaran program sangat dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dalam bidang masing-masing. Terkait dengan hal kesiapan sumber daya manusia dalam implementasi program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Padang masih dikatakan minim dikarenakan kurangnya pendampingan dalam melaksanakan perbaikan rumah tidak layak huni.

5.2.3 Anggaran

Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran yang lain yang mencakup jangka waktu satu tahun. Tidak ada satupun organisasi atau lembaga memiliki anggaran yang tidak terbatas, sehingga proses penyusunan anggaran menjadi hal penting dalam sebuah proses perencanaan. Agar pelaksanaan program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni dengan lancar tentunya juga memerlukan anggaran yang memadai dalam setiap kegiatannya, mulai dari pembuatan program, pelaksanaan kegiatan, sampai pada tahap evaluasi laporan, semua kegiatan tersebut membutuhkan dana. Minimnya anggaran menyebabkan pelaksanaan program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni belum berjalan secara efektif dan efisien.

6. Penutup

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada Bab V diatas, Implementasi Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Padang secara umum sudah berjalan baik, tetapi di lapangan masih ditemukan beberapa kendala yang menghambat dalam proses implementasi tersebut. Maka penelitian terkait Implementasi Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Padang dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Komunikasi dalam Implementasi Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Padang sudah berjalan namun masih belum optimal. Karena masih ada masyarakat yang belum mengetahui serta memahami tujuan dari program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni. Kemudian dilihat dari indikator Sumber Daya, masih belum optimal karena dari segi aspek staf atau sumber daya manusia yaitu fasilitator lapangan belum maksimal dalam melakukan pendampingan dilapangan. Dilihat dari segi anggaran masih belum optimal karena keterbatasan anggaran untuk perbaikan rumah tidak layak huni agar menjadi rumah layak huni. Kemudian dilihat dari indikator Disposisi, sudah berjalan cukup optimal. Bisa dikatakan optimal karena dari dinas perumahan rakyat kawasan

permukiman dan pertanahan kota padang dan fasilitator lapangan bersikap sesuai dengan peraturan yang ada. Dan dilihat dari indikator Struktur Birokrasi, masih belum optimal. Karena masyarakat ada yang tidak mau menerima bahan material bangunan sesuai dengan klasifikasi yang sudah ada dalam SOP atau Perwako. Jadi dari empat indikator masih belum optimal.

2. Faktor-faktor yang menghambat dalam Implementasi Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Padang adalah sebagai berikut:
 1. Komunikasi
 2. sumber daya manusia
 3. anggaran.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan diatas, penulis memberikan saran atau masukan-masukan sebagai berikut:

1. Implementor harus lebih memperhatikan komunikasi pada saat menyampaikan informasi ke masyarakat mengenai program bantuan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Agar keselarasan informasi terutama masyarakat penerima bantuan memahami tujuan dari program perbaikan rumah tidak layak huni ini dan aturan-aturan yang harus dipenuhi.
2. Peningkatan sumber daya manusia agar program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni

berjalan maksimal, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Padang diharapkan mampu memberikan pelatihan yang lebih untuk meningkatkan kemampuan tenaga ahli yakni fasilitator lapangan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni agar pendampingan yang diberikan kepada penerima bantuan menjadi lebih maksimal.

3. Pemerintah Daerah diharapkan untuk meningkatkan anggaran untuk tahun yang akan datang, dan menyesuaikan dengan harga material bangunan dilingkup pemerintahan Kota Padang, sehingga masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni dapat mendapatkan perbaikan rumah yang lebih maksimal dan bisa mencapai rumah yang layak huni.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2017. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Budihardjo, Eko. 2006. *Sejumlah Masalah Permukiman Kota*. Bandung: P.T. Alumni.
- Creswell W. John. 2013. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

- Hadari, Nawawi. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis yang Kompetitif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Pres.
- Hasibuan, Malayu. 2005. *Organisasi dan Motivasi, Dasar Peningkatan Produktivitas*. Jakarta: Bumi Pusaka.
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yoyakarta: Gava Media.
- Mulyadi, Deddy. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Nugroho, Riant. 2017. *Public policy*. Jakarta: Alex Media Komputindo.
- Panudju, Bambang. 2009. *Pengadaan Perumahan Kota dengan Peran serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah*. Bandung : PT Alumni.
- Solihin, ismail. 2009. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik. Konsep, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Suharno. 2013. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Ombak.
- Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Sunggono, Bambang. 2010. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Tahir, Arifin. 2015. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *Teori dan Konsep Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Lukman Offset & YPAPI.
- Umar, Husein. 2005. *Evaluasi Kinerja Perusahaan (Teknik Evaluasi Bisnis dan Kinerja Perusahaan Secara Komprehensif, Kuantitatif, dan Modern)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Wahab, Solichin Abdul. 2016. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Model- Model Implemen tasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. 2011. *Analisis kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan*

Publik. Malang. Bayumedia Publishing.

Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*. Yogyakarta:CAPS.

Wirawan. 2012. *Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi & Profesi*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.

Peraturan Walikota (PERWAKO) Padang Nomor 25.A Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Tahun 2016

Jurnal :

Ghafaralie, Bima. 2015. *Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Tahun 2013*.

Wahyuningrum, Tri. 2015. *Evaluasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh) Di Desa Kedungrejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun*.

Dokumen:

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H Amandemen kedua.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/Prt/M/2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

